



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**RINGKASAN
RANCANGAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan
Nomor :
Tanggal :

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.608.776.752.400	5.851.786.641.087	243.009.888.687	4 %
4.1.01	Pajak Daerah	4.149.362.000.000	4.355.163.819.899	205.801.819.899	5 %
4.1.02	Retribusi Daerah	9.227.594.873	11.273.357.173	2.045.762.300	22 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	164.439.441.509	160.133.041.509	(4.306.400.000)	3 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.285.747.716.018	1.325.216.422.506	39.468.706.488	3 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.132.219.569.000	5.558.875.638.479	426.656.069.479	8 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.132.219.569.000	5.558.875.638.479	426.656.069.479	8 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.540.000.000	3.882.686.676	342.686.676	10 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.540.000.000	3.882.686.676	342.686.676	10 %
	Jumlah Pendapatan	10.744.536.321.400	11.414.544.966.242	670.008.644.842	6 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	5.419.098.902.515	5.438.401.931.441	19.303.028.926	0 %
5.1.01	Belanja Pegawai	2.764.489.220.825	2.465.856.785.841	(298.632.434.984)	11 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.261.248.587.690	2.582.366.841.600	321.118.253.910	14 %
5.1.03	Belanja Bunga	16.000.000.000	16.000.000.000	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	377.361.094.000	374.178.304.000	(3.182.790.000)	1 %
5.2	BELANJA MODAL	1.288.129.124.777	1.438.976.490.939	150.847.366.162	12 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.210.352.941	3.842.650.941	(2.367.702.000)	38 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292.531.147.223	395.240.096.824	102.708.949.601	35 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	353.308.840.131	377.771.037.893	(30.537.807.238)	9 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	567.582.191.500	656.288.186.799	88.705.995.299	16 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.396.592.982	59.430.523.482	(6.966.069.500)	10 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.100.000.000	1.404.000.000	(696.000.000)	33 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.000.000.000	14.000.000.000	(2.000.000.000)	13 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000	14.000.000.000	(2.000.000.000)	13 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan
Nomor :
Tanggal :

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4	BELANJA TRANSFER	3.788.527.034.120	4.480.083.586.335	691.556.552.215	18 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.943.590.766.667	2.379.396.633.147	435.805.866.480	22 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.844.936.267.453	2.100.686.953.188	255.750.685.735	14 %
	Jumlah Belanja	10.511.755.061.412	11.371.462.008.715	859.706.947.303	8 %
	Total Surplus/(Defisit)	232.781.259.988	43.082.957.527	(189.698.302.461)	81 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	133.218.740.012	322.917.042.473	189.698.302.461	142 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	133.218.740.012	322.917.042.473	189.698.302.461	142 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	133.218.740.012	322.917.042.473	189.698.302.461	142 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	366.000.000.000	366.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	366.000.000.000	366.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	366.000.000.000	366.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	(232.781.259.988)	(43.082.957.527)	189.698.302.461	-81 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Gubernur Sumatera Selatan

H. Herman Deru



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 3 Agustus 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar
Rp10.877.755.061.412,00 bertambah sebesar
Rp859.706.947.303,00 sehingga menjadi sebesar
Rp11.737.462.008.715,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp10.744.536.321.400,00
b. Bertambah Rp670.008.644.842,00 (+)

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah Perubahan Rp11.414.544.966.242,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp10.511.755.061.412,00
b. Bertambah Rp859.706.947.303,00 (+)

Jumlah Belanja Daerah

Setelah Perubahan Rp11.371.462.008.715,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp133.218.740.012,00
2) Bertambah Rp189.698.302.461,00 (+)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp322.917.042.473,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp366.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang Rp0,00 (+/-)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp366.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto

Setelah Perubahan Rp43.082.957.527,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp 5.608.776.752.400,00
- 2) Bertambah Rp243.009.888.687,00 (+)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp5.851.786.641.087,00

b. Pendapatan Transfer

- 1) Semula Rp5.132.219.569.000,00
- 2) Bertambah Rp426.656.069.479,00(+)

Jumlah Pendapatan Transfer

Setelah Perubahan Rp5.558.875.638.479,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1) Semula Rp3.540.000.000,00
- 2) Bertambah Rp342.686.676,00 (+)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah Setelah

Perubahan Rp3.882.686.676,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

- 1) Semula Rp4.149.362.000.000,00
- 2) Bertambah Rp205.801.819.899,00(+)

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp4.355.163.819.899,00

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula Rp9.227.594.873,00
- 2) Bertambah Rp2.045.762.300,00(+)

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp11.273.357.173,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- 1) Semula Rp164.439.441.509,00
- 2) Berkurang (Rp4.306.400.000,00) (-)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan Rp160.133.041.509,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp1.285.747.716.018,00
2) Bertambah	<u>Rp39.468.706.488,00 (+)</u>

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah Rp1.325.216.422.506,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp5.132.219.569.000,00
2) Bertambah	<u>Rp426.656.069.479,00 (+)</u>

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Setelah Perubahan Rp5.558.875.638.479,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp3.540.000.000,00
2) Bertambah	<u>RP342.686.676,00 (+)</u>

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp3.882.686.676,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Belanja Operasi;

1) Semula	Rp5.419.098.902.515,00
2) Bertambah	<u>Rp19.303.028.926,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Operasional

Setelah Perubahan Rp5.438.401.931.441,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp1.288.129.124.777,00
2) Bertambah	<u>Rp150.847.366.162,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp1.438.976.490.939,00

c. Belanja Tidak terduga

1) Semula	Rp16.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp2.000.000.000,00) (-)</u>

Jumlah Belanja Tidak terduga

Setelah Perubahan Rp14.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp3.788.527.034.120,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp691.556.552.215,00 (+)</u> |

Jumlah Belanja Transfer

Setelah Perubahan

Rp4.480.083.586.335,00

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp2.764.489.220.825,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp298.632.434.984,00) (-)</u> |

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan

Rp2.465.856.785.841,00

b. Belanja Barang dan Jasa

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp2.261.248.587.690,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp321.118.253.910,00 (+)</u> |

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan

Rp2.582.366.841.600,00

c. Belanja Bunga

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp16.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00 (+/-)</u> |

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan

Rp16.000.000.000,00

d. Belanja Hibah

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp377.361.094.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp 3.182.790.000,00) (-)</u> |

Jumlah Belanja Hibah

Setelah Perubahan

Rp374.178.304.000,00

- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp6.210.352.941,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp2.367.702.000,00) (-)</u> |

Jumlah Belanja Modal Tanah

Setelah Perubahan

Rp3.842.650.941,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp292.531.147.223,00

2) Bertambah Rp102.708.949.601,00 (+)

Jumlah Belanja Modal Peralatan

Dan Mesin Setelah Perubahan Rp395.240.096.824,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp 353.308.840.131,00

2) Berkurang (Rp30.537.807.238,00) (-)

Jumlah Belanja Modal

Gedung dan Bangunan

Setelah Perubahan Rp322.771.032.893,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula Rp567.582.191.500,00

2) Bertambah Rp88.705.995.299,00 (+)

Jumlah Belanja Modal Jalan,

Jaringan dan irigasi Setelah

Perubahan Rp656.288.186.799,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp66.396.592.982,00

2) Berkurang (Rp6.966.069.500,00) (-)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya Setelah Perubahan Rp59.430.523.482,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula Rp2.100.000.000,00

2) Berkurang (Rp696.000.000,00) (-)

Jumlah Belanja Modal Aset

Lainnya Setelah Perubahan Rp1.404.000.000,00

(3) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :

a. Semula Rp16.000.000.000,00

b. Berkurang (Rp2.000.000.000,00) (-)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp14.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp1.943.590.766.667,00

2) Bertambah Rp435.805.866.480,00 (+)

Jumlah Belanja Bagi Hasil

Setelah Perubahan

Rp2.379.396.633.147,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp1.844.936.267.453,00

2) Bertambah Rp255.750.685.735,00 (+)

Jumlah Belanja Bantuan

Keuangan Setelah Perubahan

Rp2.100.686.953.188,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp133.218.740.012,00

2) Bertambah Rp189.698.302.461,00 (+)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan

Rp322.917.042.473,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp366.000.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp0,00 (+/-)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan

Rp366.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

1) Semula Rp 133.218.740.012,00

2) Bertambah Rp189.698.302.461,00 (+)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun sebelumnya

Setelah Perubahan

Rp322.917.042.473,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula Rp366.000.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp0,00 (+/-)

Jumlah Penyertaan Modal

Setelah Perubahan Rp366.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran lainnya yang sudah jatuh tempo;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ir. S.A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (- /2023)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran Nomor 7 Jakarta 10110 Telpun (021) 3501092, Fax. (021) 3501161
http://keuda.kemendagri.go.id email:djkd@kemendagri.go.id.

TANDA TERIMA DOKUMEN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI :	SUMATERA SELATAN
------------	------------------

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Surat Keabsahan Dokumen	<input checked="" type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA
	a. Nomor	910 / 03380 / BPUKAD - 11 / 2023.
	b. Tanggal	14 - 8 - 2023.
2	Surat Pengantar dari Gubernur	<input checked="" type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA
	a. Nomor	188.341 / 267 / BPUKAD / 2023.
	b. Tanggal	14 - 8 - 2023.
3	Ranperda tentang Perubahan APBD	<input checked="" type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA
	Jumlah Ranperda yang Disampaikan	1 Rtd.
4	Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD	<input checked="" type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA
	Jumlah Ranpergub yang Disampaikan	1 Rtd.
5	Persetujuan Bersama antara Pemda dan DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD	<input checked="" type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA
	a. Nomor	142 Tahun 2023
	b. Tanggal	638 / 16818 / DPRD / 2023
		14 - 8 - 2023.
	c. Melampaui/Tidak Melampaui Batas Waktu Sesuai Peraturan Perundang-undangan	<input type="checkbox"/> MELAMPAUI <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK MELAMPAUI
6	Apakah ada KUA yang telah disepakati antara Gubernur dan DPRD	<input checked="" type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA
	a. Nomor	141 Tahun 2023
	b. Tanggal	047 / 1100 / BPUKAD - 11 / 2023
		3 - 8 - 2023.
7	Apakah ada PPAS yang telah disepakati antara Gubernur dan DPRD	<input checked="" type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA
	a. Nomor	142 Tahun 2023
	b. Tanggal	048 / 1100 / BPUKAD - 11 / 2023.
		3 - 8 - 2023.
8	Apakah ada Risalah Sidang	<input checked="" type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA
9	Apakah ada Nota Keuangan	<input checked="" type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA
10	Apakah ada Pengantar Nota Keuangan	<input checked="" type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA
11	Apakah ada RKPD Perubahan	<input checked="" type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA
12	Tanggal Perda dan Peraturan Gubernur diterima Mendagri	16 Agustus 2023.
13	Batas Waktu Pembahasan (15 Hari Kerja)	
	Dari Tanggal	18 Agustus 2023.
	Sampai Dengan Tanggal	7 September 2023.

Dengan diterimanya surat Saudara Nomor 188.341.267 / BPUKAD hms. Tanggal 14-8-2023, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 Provinsi Sumatera Selatan yang diterima pada hari ini 16-8-2023 dapat / tidak dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 16-8-2023.

Yang Menyerahkan,
BOBI NOVIAN

Yang Menerima,
Yuliana

Petugas ULA : Musafirin Ikran
Tanda Tangan :

Mengetahui,
Kepala Bagian Umum
Setditjen Bina Keuangan Daerah
7/16/23.

DATE LINE :
7 Sept 2023



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 14 Agustus 2023

Nomor : 188.341/ 2671 /BPKAD/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) set Buku

Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kepada

Yth. Menteri Dalam Negeri RI

c.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah
di

Jakarta

Sesuai amanat Pasal 314 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan mempedomani Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini disampaikan :

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu mohon kiranya Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tersebut dapat dievaluasi sehingga dapat kami tetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



H. HERMAN DERU

Tembusan :

Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id